



Strategi PMPP TNI dalam Meningkatkan Profesionalisme Prajurit *Peacekeeping*

Arbin Sany¹ Agus Winanrna² Ruslan Arief³

Program Studi Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas
Pertahanan Republik Indonesia, Bogor, Indonesia^{1,2,3}

Email: arbinjunita11@gmail.com¹ aguswin@idu.ac.id² ruslanarief01@gmail.com³

Abstrak

Kompleksitas operasi pemeliharaan perdamaian modern menuntut prajurit TNI yang profesional, adaptif, mampu berkomunikasi dalam lingkungan multinasional, menguasai prosedur PBB, serta siap menghadapi dinamika konflik di daerah misi. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI dalam meningkatkan profesionalisme prajurit pada operasi pemeliharaan perdamaian dunia, mengidentifikasi kendala penerapannya, dan merumuskan solusi strategis yang relevan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, triangulasi, serta analisis SWOT dengan matriks IFAS dan EFAS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMPP TNI meningkatkan profesionalisme prajurit melalui penguatan sistem pelatihan praturgas, pembinaan mental dan disiplin, penyesuaian materi latihan dengan kebutuhan operasi PBB, pemanfaatan pengalaman misi, serta penguatan kerja sama internasional. Kendala utama meliputi keterbatasan kemampuan bahasa asing, sarana simulasi yang belum sepenuhnya realistis, kemampuan teknis pengoperasian dan pemeliharaan alutsista yang belum merata, serta keterbatasan dukungan anggaran dan logistik. Analisis SWOT menunjukkan posisi organisasi pada Kuadran II dengan koordinat (-0,20; 1,05), sehingga strategi yang direkomendasikan adalah strategi W-O. Rekomendasi penelitian menekankan pengembangan e-learning, simulasi digital, peningkatan bahasa asing, pembaruan kurikulum berbasis lesson learned, penguatan kualitas instruktur, serta modernisasi fasilitas latihan.

Kata Kunci: PMPP TNI, Profesionalisme Prajurit, Operasi Pemeliharaan Perdamaian, SWOT, Pelatihan Praturgas



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dinamika lingkungan strategis global memperlihatkan bahwa operasi pemeliharaan perdamaian tidak lagi berada dalam konteks konflik konvensional yang sederhana. Konflik modern berlangsung secara multidimensi, melibatkan aktor negara dan non-negara, serta memunculkan ancaman hibrida yang berkaitan dengan aspek militer, politik, kemanusiaan, sosial, informasi, dan teknologi. Pada lingkungan seperti ini, prajurit penjaga perdamaian tidak cukup hanya memiliki kemampuan tempur dasar, tetapi harus mampu memahami mandat misi, menjunjung prinsip imparialitas, melindungi warga sipil, membangun komunikasi lintas budaya, serta menjaga disiplin dalam batas Rules of Engagement. Dengan demikian, profesionalisme prajurit menjadi faktor kunci dalam keberhasilan operasi pemeliharaan perdamaian dunia (Huntington, 1957; Brooks, 2021). Indonesia memiliki komitmen panjang dalam operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keterlibatan tersebut sejalan dengan amanat konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia dan memperkuat peran diplomasi pertahanan Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia secara konsisten mengirimkan prajurit ke berbagai misi PBB, baik dalam bentuk satuan tempur, satuan pendukung, military observer, military staff, police, satuan medis, zeni, CIMIC, MCOU, MPU, maupun Maritime Task Force. Keterlibatan lintas fungsi tersebut menunjukkan bahwa pembinaan profesionalisme peacekeeper Indonesia

harus dirancang secara spesifik sesuai karakteristik penugasan dan kondisi medan operasi. Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI berperan sebagai institusi utama yang menyiapkan, melatih, mengirim, memulangkan, dan mengevaluasi prajurit TNI yang akan bertugas dalam operasi pemeliharaan perdamaian. Berdasarkan fungsi kelembagaannya, PMPP TNI tidak hanya menjalankan kegiatan pelatihan teknis, tetapi juga mengelola sistem pembinaan yang mencakup seleksi personel, penyelarasan kurikulum dengan standar PBB, penyelenggaraan Pre-Deployment Training (PDT), dukungan administrasi, kerja sama internasional, serta pemanfaatan lesson learned dari misi sebelumnya. Posisi PMPP TNI tersebut menempatkannya sebagai pusat kendali pembinaan profesionalisme peacekeeper Indonesia.

Secara normatif, prajurit yang disiapkan untuk misi PBB diharapkan memiliki kompetensi teknis, taktis, mental, sosial, budaya, dan etika yang sesuai dengan standar operasi internasional. Prajurit harus memahami mandat misi, Rules of Engagement, Protection of Civilians, prosedur patroli, checkpoint, negosiasi, komunikasi lintas budaya, serta mekanisme koordinasi dengan aktor militer dan sipil dari berbagai negara. Pada saat yang sama, prajurit juga harus membawa identitas sebagai prajurit TNI yang berdisiplin, berintegritas, dan mampu menjadi representasi negara di forum internasional. Namun demikian, hasil pengamatan dan data penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah kesenjangan antara tuntutan profesionalisme peacekeeper dan kondisi pembinaan yang tersedia. Permasalahan yang menonjol meliputi keterbatasan kemampuan bahasa asing, belum meratanya penguasaan Rules of Engagement, belum optimalnya pelatihan tematik bagi satuan tertentu, keterbatasan fasilitas simulasi yang menyerupai medan operasi, serta kebutuhan peningkatan kemampuan teknis pengoperasian dan pemeliharaan alutsista. Kesenjangan tersebut menjadi penting karena operasi perdamaian modern sangat bergantung pada kemampuan personel dalam bekerja secara interoperabel dengan kontingen negara lain. Kajian terdahulu telah membahas aspek peran Standby Force, peningkatan kualitas sumber daya manusia, tugas dan fungsi PMPP TNI, kebijakan nasional penyiapan pasukan, serta kinerja PMPP dalam mendukung operasi perdamaian (Sumertha & Armawi, 2011; Suparman, 2023; Handoyo & Muslim, 2024; Asmoro et al., 2024). Akan tetapi, sebagian besar penelitian tersebut belum secara spesifik menempatkan strategi kelembagaan PMPP TNI sebagai objek utama untuk menganalisis proses peningkatan profesionalisme prajurit secara utuh, mulai dari perencanaan strategi, pelaksanaan pelatihan, pemanfaatan sumber daya, sampai evaluasi kelembagaan. Celah ini menunjukkan perlunya artikel yang secara ringkas tetapi komprehensif mengubah temuan tesis menjadi format artikel ilmiah.

Kebaruan artikel ini terletak pada pepaduan analisis strategi kelembagaan PMPP TNI dengan pendekatan Ends-Ways-Means, teori profesionalisme militer, pengembangan sumber daya manusia, dan analisis SWOT. Dengan kerangka tersebut, artikel ini tidak hanya menjelaskan apa yang dilakukan PMPP TNI, tetapi juga menilai keselarasan antara tujuan peningkatan profesionalisme, cara yang ditempuh melalui pelatihan dan kerja sama, serta sumber daya yang tersedia untuk mendukung implementasi strategi. Artikel ini juga memosisikan lesson learned, e-learning, simulasi digital, dan kerja sama internasional sebagai peluang strategis untuk mengatasi kelemahan internal. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis strategi PMPP TNI dalam meningkatkan profesionalisme prajurit pada operasi pemeliharaan perdamaian dunia, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi tersebut, dan merumuskan solusi strategis yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas pembinaan peacekeeper Indonesia.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel 1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis/Tahun	Judul/Fokus	Tujuan	Metode	Hasil	Kontribusi dan Relevansi
1	Sumertha & Armawi (2011)	Kinerja PMPP TNI dalam penyiapan kemampuan prajurit	Mengevaluasi kesiapan PMPP TNI dalam penyiapan peacekeeper	Kualitatif evaluatif	PMPP TNI berperan dalam administrasi, logistik, pelatihan, dan penguatan kesiapan personel	Menjadi dasar melihat kinerja PMPP, tetapi belum menelaah strategi peningkatan profesionalisme secara sistemik
2	Martani, Sumertha, & Hidayat (2020)	Peran Standby Force PMPP TNI	Menganalisis fungsi SBF dalam rotasi dan kesiapan pasukan	Kualitatif	SBF membantu kelancaran rotasi, kesiapan personel, dan penyiapan administrasi	Relevan pada aspek kesiapan, namun belum membahas strategi kelembagaan PMPP secara menyeluruh
3	Suparman (2023)	Tugas dan fungsi PMPP TNI	Menjelaskan peran PMPP dalam mendukung kesiapan satgas TNI	Deskriptif kualitatif	PMPP memiliki fungsi strategis pada perencanaan, latihan, logistik, dan pengawasan	Menegaskan posisi kelembagaan PMPP sebagai aktor penting dalam pembinaan peacekeeper
4	Handoyo & Muslim (2024)	Strategi peningkatan kualitas SDM peacekeeper	Mengkaji peningkatan kualitas SDM di PMPP TNI	Kualitatif	Peningkatan kompetensi teknis, soft skills, kepemimpinan, dan teknologi pelatihan diperlukan secara berkelanjutan	Relevan untuk pengembangan SDM, tetapi fokusnya belum pada analisis strategi organisasi berbasis SWOT
5	Asmoro, Mahroza, & Santoso (2024)	Penyiapan pasukan dalam misi perdamaian PBB	Menganalisis sinergi kebijakan penyiapan pasukan	Kualitatif	Penyiapan pasukan membutuhkan koordinasi Kemhan, Mabes TNI, dan PMPP TNI	Menjadi pijakan melihat dimensi kebijakan makro, namun belum merinci penerapan strategi di PMPP
6	Krishnasamy (2025)	Experiential learning and peacekeeping	Menilai peran pembelajaran pengalaman dalam peacekeeping	Kajian kualitatif	Pengalaman misi menjadi sumber belajar penting untuk adaptasi, pengambilan keputusan, dan profesionalisme	Mendukung penggunaan lesson learned dalam pembaruan kurikulum PMPP TNI
7	Buitelaar (2025)	Leadership agency in UN peace operations	Menganalisis peran kepemimpinan dalam efektivitas misi	Kualitatif	Kepemimpinan adaptif meningkatkan kolaborasi, kapasitas personel, dan efektivitas misi	Menguatkan urgensi pembinaan kepemimpinan dan profesionalisme dalam PDT

Tabel penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai peacekeeping telah berkembang pada aspek kesiapan, kebijakan, pengembangan SDM, dan evaluasi kinerja. Akan tetapi, artikel ini menempatkan strategi PMPP TNI secara lebih operasional melalui pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, serta perumusan strategi W-O sebagai dasar rekomendasi peningkatan profesionalisme prajurit.

Kontribusi Indonesia dan Posisi PMPP TNI

Kontribusi Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian menunjukkan karakter yang konsisten dan multidimensional. Data yang diolah dalam tesis memperlihatkan bahwa Indonesia tidak hanya mengirim satu jenis satuan, tetapi juga menempatkan prajurit pada

beragam fungsi seperti Yonmek, military observer, military staff, Military Police Unit, zeni, CIMIC, MCOU, FHQSU, medis, police, dan Maritime Task Force. Ragam penugasan tersebut menuntut PMPP TNI memiliki sistem pembinaan yang tidak seragam, melainkan diferensiatif sesuai fungsi, medan, mandat, dan risiko operasi. Pada periode 2015 sampai 2026, jumlah personel Indonesia dalam misi PBB relatif tinggi, meskipun terjadi penurunan pada 2025 dan 2026 dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan jumlah personel tidak serta-merta mengurangi kebutuhan profesionalisme. Sebaliknya, ketika mandat misi berubah, kontribusi personel harus semakin berkualitas karena setiap prajurit membawa tanggung jawab operasional, diplomatik, dan representasi negara. Dengan demikian, strategi PMPP TNI harus memadukan kesiapan jumlah, kualitas kompetensi, dan relevansi kemampuan terhadap kebutuhan misi.

Tabel 2. Jumlah Personel Indonesia dalam Misi Perdamaian PBB Tahun 2015-2026

No	Tahun	Jumlah Personel	Misi Utama	Jenis Penugasan
1	2015	2.755	UNIFIL, MONUSCO, MINUSCA, UNMISS, UNISFA, UNAMID, UNFICYP, MINURSO, UNTMIS	Yonmek, Milobs, MPU, Milstaff, Zeni, CIMIC, MCOU, FHQSU, Medic, Police, MTF
2	2016	2.755	UNIFIL, MONUSCO, MINUSCA, UNMISS, UNISFA, UNAMID, UNFICYP, MINURSO, UNTMIS	Yonmek, Milobs, MPU, Milstaff, Zeni, CIMIC, MCOU, FHQSU, Medic, Police, MTF
3	2017	2.755	UNIFIL, MONUSCO, MINUSCA, UNMISS, UNISFA, UNAMID, UNFICYP, MINURSO, UNTMIS	Yonmek, Milobs, MPU, Milstaff, Zeni, CIMIC, MCOU, FHQSU, Medic, Police, MTF
4	2018	2.700	UNIFIL, MONUSCO, MINUSCA, UNMISS, UNISFA, UNFICYP, MINURSO	Yonmek, Milobs, MPU, Milstaff, Zeni, CIMIC, MCOU, FHQSU, Medic, Police, MTF
5	2019	2.897	UNIFIL, MONUSCO, MINUSCA, UNMISS, UNISFA, UNFICYP, MINURSO	Yonmek, Milobs, MPU, Milstaff, Zeni, CIMIC, MCOU, FHQSU, Medic, Police, MTF
6	2020	2.850	UNIFIL, MONUSCO, MINUSCA, UNMISS, UNISFA, UNFICYP, MINURSO	Yonmek, Milobs, MPU, Milstaff, Zeni, CIMIC, MCOU, FHQSU, Medic, Police, MTF
7	2021	2.804	UNIFIL, MONUSCO, MINUSCA, UNMISS, UNISFA, UNFICYP, MINURSO	Yonmek, Milobs, MPU, Milstaff, Zeni, CIMIC, MCOU, FHQSU, Medic, Police, MTF
8	2022	2.689	UNIFIL, MONUSCO, MINUSCA, UNMISS, UNISFA, UNFICYP, MINURSO	Yonmek, Milobs, MPU, Milstaff, Zeni, CIMIC, MCOU, FHQSU, Medic, Police, MTF
9	2023	2.714	UNIFIL, MONUSCO, MINUSCA, UNMISS, UNISFA, UNFICYP	Yonmek, Milobs, MPU, Milstaff, Zeni, CIMIC, MCOU, FHQSU, Medic, Police, MTF
10	2024	2.756	UNIFIL, MONUSCO, MINUSCA, UNMISS, UNISFA, UNFICYP, UNDOF	Yonmek, Milobs, MPU, Milstaff, Zeni, CIMIC, MCOU, FHQSU, Medic, Police, MTF
11	2025	2.461	UNIFIL, MONUSCO, MINUSCA, UNMISS, UNISFA, UNFICYP, UNDOF	Yonmek, Milobs, MPU, Milstaff, Zeni, CIMIC, MCOU, FHQSU, Medic, Police, MTF
12	2026	1.961	UNIFIL, MONUSCO, MINUSCA, UNMISS, UNISFA, UNFICYP, UNDOF	Yonmek, Milobs, MPU, Milstaff, Zeni, CIMIC, MCOU, FHQSU, Medic, Police, MTF

Tabel di atas memperlihatkan bahwa beban pembinaan PMPP TNI tidak hanya terkait kuantitas personel, tetapi juga kompleksitas jenis penugasan. Satuan mekanis membutuhkan penguatan kemampuan patroli, perlindungan sipil, pemeliharaan ranpur, dan komunikasi taktis. Military observer dan military staff membutuhkan kemampuan analisis, pelaporan, diplomasi militer, dan pemahaman prosedur staf multinasional. Satuan CIMIC dan MCOU membutuhkan komunikasi sosial, negosiasi, serta kepekaan budaya. Perbedaan kebutuhan ini menjadi dasar penting bagi kurikulum yang lebih modular dan berbasis jabatan.

Kerangka Teoritis Artikel

Artikel ini menggunakan teori sumber daya manusia sebagai landasan untuk melihat prajurit sebagai aset strategis organisasi (Becker, 1975; Ramly, 2016). Dalam perspektif Human Capital Theory, pelatihan, pendidikan, pengalaman, dan kesehatan personel

dipandang sebagai investasi yang menghasilkan nilai tambah bagi organisasi. Bagi PMPP TNI, investasi ini diwujudkan dalam PDT, pembinaan mental, penguatan kompetensi teknis, kemampuan bahasa asing, serta penanaman nilai-nilai prajurit dan prinsip operasi PBB. Teori strategi digunakan untuk membaca bagaimana PMPP TNI menyelaraskan tujuan, cara, dan sumber daya (Lykke, 1989; David, 2011). Kerangka Ends-Ways-Means dari Lykke menjadi alat untuk menilai apakah tujuan peningkatan profesionalisme didukung oleh metode pembinaan yang tepat dan sumber daya yang cukup. Apabila tujuan terlalu tinggi tetapi sumber daya terbatas, maka muncul risiko strategis. Karena itu, analisis strategi tidak hanya memeriksa rencana program, tetapi juga kecukupan instruktur, anggaran, fasilitas, kurikulum, kerja sama, dan mekanisme evaluasi.

Teori profesionalisme militer digunakan untuk menjelaskan kualitas akhir yang ingin dicapai (Huntington, 1957; Janowitz, 1960; Brooks, 2021). Profesionalisme prajurit mencakup keahlian, tanggung jawab, etos korps, integritas, disiplin, serta kemampuan beradaptasi dalam lingkungan operasi. Dalam konteks peacekeeping, profesionalisme juga meliputi kemampuan non-kombatan, seperti komunikasi lintas budaya, pengendalian emosi, negosiasi, perlindungan warga sipil, kerja sama sipil-militer, dan penghormatan terhadap norma internasional. Dengan menggabungkan ketiga perspektif tersebut, artikel ini memahami profesionalisme prajurit bukan sebagai variabel tunggal, melainkan sebagai hasil dari strategi pembinaan organisasi. PMPP TNI menjadi institusi yang menghubungkan tujuan diplomasi pertahanan Indonesia, standar operasi PBB, kebutuhan satuan tugas, dan pembentukan kapasitas personel. Oleh karena itu, penilaian terhadap strategi PMPP TNI harus melihat hubungan antara kebijakan, kurikulum, instruktur, sarana, metode evaluasi, serta pengalaman lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi deskriptif (Moleong, 2014). Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah memperoleh pemahaman mendalam mengenai strategi kelembagaan PMPP TNI, kendala implementasi, serta alternatif solusi dalam meningkatkan profesionalisme prajurit pada operasi pemeliharaan perdamaian dunia. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, pengalaman, persepsi, dan penilaian informan yang terlibat langsung dalam proses penyiapan maupun pelaksanaan misi perdamaian. Lokasi penelitian adalah Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI di Sentul, Bogor, serta satuan dan personel yang memiliki pengalaman terkait penyiapan atau pelaksanaan misi PBB. Subjek penelitian terdiri atas informan tingkat strategis, operasional, instruktur, dan pelaku lapangan yang pernah terlibat dalam penugasan operasi pemeliharaan perdamaian. Pemilihan informan dilakukan secara purposive karena informan dipandang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan otoritas yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Wawancara digunakan untuk memperoleh pandangan informan mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam strategi pembinaan profesionalisme prajurit. Dokumentasi digunakan untuk menelaah data organisasi, struktur PMPP TNI, materi pelatihan, hasil evaluasi, serta data terkait kontribusi Indonesia dalam misi PBB. Studi literatur digunakan untuk memperkuat landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka analisis. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan informan dari level strategis, instruktur, dan pelaku lapangan. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Langkah ini diperlukan agar temuan tidak hanya bertumpu

pada satu jenis data, tetapi memiliki dukungan bukti yang saling menguatkan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi sebagaimana lazim digunakan dalam analisis kualitatif (Miles & Huberman, 1994). Data wawancara direduksi ke dalam tema-tema utama, kemudian disajikan dalam tabel tematik dan matriks SWOT. Selanjutnya, faktor internal dan eksternal diberi bobot dan rating melalui IFAS dan EFAS untuk memperoleh posisi strategis organisasi. Hasil akhir analisis digunakan untuk menentukan strategi prioritas yang paling sesuai dengan kondisi PMPP TNI.

Tabel 3. Subjek dan Objek Penelitian

Komponen	Penjelasan	Indikator Pengukuran
Subjek penelitian	Personel PMPP TNI, instruktur, unsur kebijakan, dan prajurit yang memiliki pengalaman misi perdamaian dunia.	Profil jabatan, pengalaman misi, keterlibatan dalam pelatihan, dan penguasaan isu peacekeeping.
Objek penelitian	Strategi PMPP TNI dalam meningkatkan profesionalisme prajurit pada operasi pemeliharaan perdamaian dunia.	Kebijakan, program pelatihan, kurikulum, metode pembinaan, fasilitas, evaluasi, kerja sama internasional, dan pemanfaatan lesson learned.
Teknik pengumpulan data	Wawancara, dokumentasi, dan studi literatur.	Konsistensi jawaban informan, kesesuaian dokumen, dan relevansi teori.
Teknik analisis	Reduksi data, penyajian data, verifikasi, triangulasi, IFAS, EFAS, dan matriks SWOT.	Terbentuknya tema S-W-O-T, skor strategis, koordinat SWOT, dan rekomendasi strategi.

Gambaran Objek dan Informan Penelitian

PMPP TNI memiliki peran strategis sebagai pusat penyiapan peacekeeper Indonesia. Kelembagaan ini menghubungkan kebijakan Mabes TNI, standar PBB, kebutuhan satuan pengirim, dan kondisi operasi di daerah misi. Dalam praktiknya, PMPP TNI menjalankan fungsi perencanaan, latihan, operasi, logistik, kerja sama internasional, pembinaan personel, serta evaluasi penugasan. Kompleksitas fungsi tersebut menyebabkan strategi peningkatan profesionalisme tidak hanya bertumpu pada satu direktorat atau satu kegiatan pelatihan, tetapi pada koordinasi antarunsur yang saling mendukung. Informan penelitian berasal dari unsur yang memiliki pengetahuan dan pengalaman berbeda, mulai dari komandan kontingen, pejabat PMPP TNI, instruktur, personel yang pernah bertugas di daerah misi, sampai pelaku lapangan yang merasakan langsung manfaat maupun keterbatasan pelatihan. Komposisi informan tersebut membantu penelitian melihat strategi PMPP TNI dari tiga sudut pandang: kebijakan, penyelenggaraan latihan, dan pengalaman operasional di daerah misi. Data dari informan memperlihatkan bahwa profesionalisme prajurit dipahami secara luas. Pada level kebijakan, profesionalisme berkaitan dengan pemenuhan standar PBB dan reputasi negara. Pada level pelatihan, profesionalisme berkaitan dengan kemampuan mengikuti prosedur, menguasai materi, menjalankan skenario, dan memenuhi evaluasi. Pada level lapangan, profesionalisme berkaitan dengan kemampuan beradaptasi, menjaga disiplin, memahami budaya lokal, mengatasi kendala bahasa, dan tetap efektif dalam situasi tekanan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi PMPP TNI dalam meningkatkan profesionalisme prajurit dilakukan melalui sistem pelatihan praturgas yang diarahkan pada pemenuhan standar PBB dan kebutuhan nyata daerah operasi. Pelatihan tidak hanya berisi materi taktis, tetapi juga pembinaan mental, disiplin, etika, pemahaman mandat, Rules of Engagement, Protection of Civilians, komunikasi sosial, pemahaman budaya lokal, dan

mekanisme koordinasi dalam lingkungan multinasional. Dengan demikian, PDT menjadi instrumen utama pembentukan profesionalisme prajurit sebelum diberangkatkan ke daerah misi. Kekuatan utama PMPP TNI terletak pada efektivitas sistem pelatihan pratusas, kemampuan adaptasi sosial dan budaya prajurit, serta kesesuaian materi latihan dengan kebutuhan operasi. Informan menilai bahwa pelatihan PMPP TNI telah memberikan kerangka yang cukup kuat untuk membentuk kesiapan teknis, taktis, mental, dan perilaku prajurit. Kemampuan adaptasi sosial dan budaya juga menjadi karakter menonjol karena prajurit Indonesia relatif mudah membangun komunikasi dengan masyarakat lokal dan kontingen negara lain. Kelemahan yang ditemukan meliputi kemampuan bahasa asing yang masih terbatas, fasilitas simulasi yang belum sepenuhnya menggambarkan kondisi daerah misi, serta kemampuan teknis pengoperasian dan pemeliharaan alutsista yang belum merata. Kelemahan ini berdampak pada komunikasi operasional, efektivitas latihan, dan kesiapan teknis personel dalam menghadapi kondisi medan yang ekstrem. Keterbatasan tersebut tidak meniadakan peran PMPP TNI, tetapi menunjukkan area yang perlu diperbaiki agar sistem pembinaan lebih adaptif. Peluang eksternal yang dapat dimanfaatkan PMPP TNI meliputi pemanfaatan teknologi simulasi digital dan e-learning, penguatan kerja sama internasional dan joint training peacekeeper, serta pengembangan kurikulum berbasis lesson learned. Peluang ini penting karena standar misi PBB terus berkembang dan membutuhkan metode pembelajaran yang lebih fleksibel, realistis, dan berbasis pengalaman operasi. Sebaliknya, ancaman yang dihadapi meliputi dinamika konflik di wilayah operasi, tekanan psikologis prajurit, serta keterbatasan anggaran, logistik, dan kesiapan alutsista.

Tabel 4. Temuan Utama Faktor Internal PMPP TNI

Aspek	Temuan	Implikasi terhadap Profesionalisme
Kekuatan	Sistem pelatihan pratusas efektif dalam membentuk kesiapan teknis, taktis, mental, dan pemahaman standar PBB.	Prajurit memiliki dasar profesional untuk menjalankan mandat, ROE, patroli, checkpoint, dan perlindungan warga sipil.
Kekuatan	Kemampuan adaptasi sosial dan budaya prajurit relatif baik.	Mendukung interaksi dengan masyarakat lokal, kontingen multinasional, dan aktor sipil di daerah operasi.
Kekuatan	Materi latihan cukup relevan dengan kebutuhan misi.	Membantu prajurit memahami prosedur operasi perdamaian dan tuntutan perilaku peacekeeper.
Kelemahan	Kemampuan bahasa asing masih terbatas.	Menghambat komunikasi multinasional, negosiasi, koordinasi, dan pelaporan operasi.
Kelemahan	Sarana simulasi dan fasilitas latihan realistis belum optimal.	Latihan belum sepenuhnya mereplikasi medan, cuaca, tekanan sosial, dan dinamika konflik daerah misi.
Kelemahan	Kemampuan teknis pengoperasian dan pemeliharaan alutsista belum merata.	Menurunkan kesiapan teknis, keselamatan, dan efektivitas penggunaan kendaraan tempur/taktis di daerah operasi.

Tabel 5. Temuan Utama Faktor Eksternal PMPP TNI

Aspek	Temuan	Implikasi Strategis
Peluang	Teknologi simulasi digital dan e-learning dapat digunakan untuk memperkuat pembelajaran sebelum latihan lapangan.	Materi dasar dapat dipelajari lebih awal, sedangkan waktu tatap muka difokuskan pada praktik dan skenario.
Peluang	Kerja sama internasional dan joint training peacekeeper semakin terbuka.	PMPP TNI dapat memperbarui standar pelatihan, meningkatkan kualitas instruktur, dan memperluas jejaring pusat pelatihan.
Peluang	Lesson learned dari misi sebelumnya dapat dijadikan basis pembaruan kurikulum.	Pengalaman lapangan menjadi sumber pembelajaran organisasi yang meningkatkan realisme latihan.

Ancaman	Dinamika konflik dan perubahan mandat PBB berlangsung cepat.	Kurikulum dan skenario latihan harus diperbarui secara periodik agar tidak tertinggal dari kondisi operasi.
Ancaman	Tekanan psikologis, kejenuhan, dan rutinitas tugas dapat memengaruhi moral.	Prajurit memerlukan pembinaan mental, dukungan komando, serta mekanisme mitigasi stres selama misi.
Ancaman	Keterbatasan anggaran, logistik, suku cadang, dan kesiapan alutsista.	Dapat mengurangi kesinambungan program pelatihan dan menurunkan kesiapan operasional satuan.

Hasil perhitungan IFAS menunjukkan subtotal kekuatan sebesar 1,40 dan subtotal kelemahan sebesar 1,60, sehingga sumbu internal berada pada nilai -0,20. Hasil perhitungan EFAS menunjukkan subtotal peluang sebesar 1,90 dan subtotal ancaman sebesar 0,85, sehingga sumbu eksternal berada pada nilai 1,05. Dengan demikian, posisi PMPP TNI berada pada Kuadran II, yaitu kondisi organisasi memiliki peluang eksternal yang besar, tetapi masih menghadapi kelemahan internal yang perlu diperbaiki. Posisi ini mengarahkan rekomendasi pada strategi W-O, yaitu memanfaatkan peluang eksternal untuk mengatasi kelemahan internal.

Tabel 6. Ringkasan IFAS dan EFAS

Aspek SWOT	Faktor Strategis	Bobot	Rating	Skor
Strengths	Efektivitas sistem pelatihan pratusas	0,17	3	0,51
Strengths	Kemampuan adaptasi sosial dan budaya	0,16	3	0,48
Strengths	Kesesuaian materi latihan dengan kebutuhan operasi	0,17	2,4	0,41
Subtotal Strengths		0,50		1,40
Weaknesses	Kemampuan bahasa asing terbatas	0,20	4	0,80
Weaknesses	Keterbatasan sarana simulasi dan fasilitas latihan realistis	0,15	3	0,45
Weaknesses	Kemampuan teknis pengoperasian dan pemeliharaan alutsista belum optimal	0,15	2,3	0,35
Subtotal Weaknesses		0,50		1,60
Sumbu Internal	Strengths - Weaknesses			-0,20
Opportunities	Pemanfaatan teknologi simulasi digital dan e-learning	0,20	4	0,80
Opportunities	Penguatan kerja sama internasional dan joint training peacekeeper	0,20	4	0,80
Opportunities	Pengembangan kurikulum berbasis lesson learned dan pengalaman misi	0,10	3	0,30
Subtotal Opportunities		0,50		1,90
Threats	Dinamika konflik di wilayah operasi	0,18	2	0,36
Threats	Tekanan psikologis prajurit	0,17	2	0,34
Threats	Keterbatasan anggaran, logistik, dan kesiapan alutsista	0,15	1	0,15
Subtotal Threats		0,50		0,85
Sumbu Eksternal	Opportunities - Threats			1,05
Posisi Strategis	Kuadran II: Weaknesses-Opportunities			(-0,20; 1,05)

Hasil Triangulasi Tematik

Triangulasi tematik dilakukan dengan mengelompokkan jawaban informan ke dalam isu yang berulang. Hasilnya menunjukkan bahwa kekuatan PMPP TNI terutama berada pada sistem pelatihan pratusas, pembinaan mental, dan kemampuan adaptasi prajurit. Kelemahan

yang paling banyak muncul adalah kemampuan bahasa asing, fasilitas simulasi realistis, serta kemampuan teknis alutsista. Peluang utama berasal dari digitalisasi pembelajaran, kerja sama internasional, dan lesson learned, sedangkan ancaman berasal dari dinamika konflik, tekanan psikologis, dan keterbatasan dukungan sumber daya.

Tabel 7. Ringkasan Triangulasi Tematik Hasil Wawancara

Tema	Sumber Temuan	Hasil Triangulasi	Makna Strategis
Sistem pelatihan pratusgas	Informan strategis, instruktur, dan pelaku lapangan	PDT membentuk kesiapan teknis, taktis, mental, dan pemahaman prosedur operasi PBB.	Menjadi kekuatan utama strategi PMPP TNI.
Adaptasi sosial dan budaya	Informan lapangan dan instruktur	Prajurit Indonesia dinilai relatif mudah membangun komunikasi sosial dan menjaga hubungan dengan masyarakat lokal.	Menjadi modal non-teknis yang mendukung keberhasilan misi.
Kesesuaian materi latihan	Instruktur dan prajurit eks misi	Materi patrol, checkpoint, PoC, ROE, negosiasi, dan komunikasi sosial dinilai relevan.	Perlu terus diperbarui sesuai perubahan mandat dan medan misi.
Bahasa asing	Hampir seluruh kelompok informan	Bahasa Inggris praktis dan bahasa teknis kendaraan masih perlu diperkuat.	Membutuhkan program berkelanjutan sejak satuan asal.
Simulasi realistis	Informan PMPP dan pelaku lapangan	Fasilitas latihan belum sepenuhnya menyerupai kondisi daerah misi.	Membutuhkan simulasi digital dan scenario-based training.
Teknis alutsista	Pelaku lapangan dan unsur logistik	Pengoperasian, pemeliharaan, suku cadang, dan kesiapan ranpur/rantis menjadi tantangan.	Perlu modul teknis berbasis pengalaman misi.
Kerja sama internasional	Informan strategis	Joint training, MTT, dan kerja sama pusat pelatihan PBB membuka peluang peningkatan kualitas.	Perlu diarahkan pada standar instruktur dan benchmarking kurikulum.
Lesson learned	Instruktur dan prajurit eks misi	Pengalaman misi dapat menjadi bahan pembaruan skenario dan kurikulum.	Perlu sistem knowledge management yang terstruktur.
Tekanan psikologis	Pelaku lapangan	Kejenuhan, rutinitas, rindu keluarga, dan tekanan medan dapat menurunkan moril.	Perlu pembinaan mental dan mekanisme mitigasi stres.

Pembahasan

Strategi PMPP TNI dapat dipahami melalui kerangka Ends-Ways-Means (Lykke, 1989). Ends atau tujuan strategisnya adalah terbentuknya prajurit peacekeeper yang profesional, adaptif, memahami mandat misi, memiliki kompetensi teknis dan taktis, serta mampu bekerja dalam lingkungan multinasional. Tujuan tersebut sejalan dengan teori profesionalisme militer yang menekankan keahlian, tanggung jawab, dan semangat korps. Dalam konteks peacekeeping, keahlian tidak hanya berarti kemampuan tempur, tetapi juga kemampuan komunikasi, negosiasi, pemahaman hukum humaniter, perlindungan sipil, dan pengendalian diri dalam situasi kompleks. Ways atau cara yang ditempuh PMPP TNI diwujudkan melalui penyelenggaraan Pre-Deployment Training, penyelarasan kurikulum dengan standar PBB, pelatihan berbasis skenario, pembinaan mental, penguatan materi ROE dan Protection of Civilians, serta evaluasi kesiapan sebelum pemberangkatan. Cara tersebut menunjukkan bahwa profesionalisme tidak dibentuk secara instan, melainkan melalui proses pembinaan yang terencana. Strategi PMPP TNI juga melibatkan kerja sama internasional, Mobile Training Team, joint training, serta pertukaran pengalaman dengan pusat pelatihan peacekeeping negara lain.

Means atau sumber daya yang digunakan mencakup instruktur, fasilitas latihan, kurikulum, dukungan satuan, jejaring kerja sama, data lesson learned, serta dukungan anggaran dan logistik. Pada aspek inilah ditemukan beberapa kelemahan internal. Keterbatasan fasilitas simulasi realistis, belum optimalnya penguasaan bahasa asing, serta keterbatasan kemampuan teknis alutsista menunjukkan bahwa kecukupan means belum sepenuhnya seimbang dengan tujuan dan cara yang telah dirancang. Ketidakseimbangan ini dapat meningkatkan risiko strategis karena tujuan peningkatan profesionalisme membutuhkan sumber daya yang memadai. Dalam perspektif teori pengembangan sumber daya manusia, prajurit peacekeeper merupakan human capital yang nilainya dapat ditingkatkan melalui investasi pendidikan, pelatihan, pengalaman, dan pembinaan karakter (Becker, 1975; Ramly, 2016). Investasi tersebut tidak hanya menghasilkan kesiapan individual, tetapi juga memperkuat reputasi Indonesia sebagai negara kontributor pasukan. Pembinaan yang dilakukan PMPP TNI harus terus diarahkan pada integrasi kompetensi teknis, soft skills, nilai TNI, dan prinsip-prinsip PBB. Pendekatan ini penting karena keberhasilan peacekeeper tidak selalu ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi oleh kemampuan menjaga kepercayaan dan stabilitas di wilayah konflik.

Kendala bahasa asing menjadi persoalan strategis karena operasi PBB menggunakan bahasa kerja internasional, terutama bahasa Inggris. Keterbatasan bahasa memengaruhi kemampuan prajurit dalam memahami perintah, menyusun laporan, berkoordinasi dengan kontingen lain, melakukan negosiasi, dan berinteraksi dengan masyarakat lokal. Oleh karena itu, peningkatan bahasa asing tidak cukup dilakukan melalui materi singkat pada tahap latihan pratugas, tetapi perlu menjadi pembinaan berkelanjutan sejak di satuan asal, saat PDT, dan selama persiapan keberangkatan. Kendala fasilitas simulasi juga berpengaruh terhadap realisme latihan. Daerah operasi seperti Lebanon, Kongo, Afrika Tengah, Sudan Selatan, Abyei, atau wilayah misi lain memiliki karakteristik medan, cuaca, ancaman, dan dinamika sosial yang berbeda dengan lingkungan latihan di dalam negeri. Ketika fasilitas latihan belum mampu mereplikasi situasi tersebut, maka prajurit berpotensi mengalami shock adaptasi pada tahap awal penugasan. Pemanfaatan teknologi virtual, simulasi digital, dan scenario-based training dapat menjadi jawaban untuk menjembatani kesenjangan antara ruang latihan dan medan tugas.

Kemampuan teknis pengoperasian dan pemeliharaan alutsista juga menjadi isu penting karena efektivitas misi sangat dipengaruhi kesiapan kendaraan tempur, kendaraan taktis, kendaraan logistik, alat komunikasi, dan perlengkapan pendukung. Keterbatasan suku cadang, usia pakai kendaraan, serta belum meratanya keterampilan pengguna dapat menurunkan kesiapan operasional dan keselamatan personel. Karena itu, pelatihan teknis tidak cukup berupa pengenalan, tetapi perlu diarahkan pada praktik pemeliharaan tingkat pengguna, trouble shooting dasar, keselamatan berkendara, serta adaptasi penggunaan alutsista dalam medan ekstrem. Hasil SWOT menunjukkan bahwa strategi W-O merupakan pilihan paling rasional. Strategi ini tidak berarti PMPP TNI berada pada posisi lemah secara keseluruhan, melainkan menunjukkan bahwa peluang eksternal yang tersedia harus digunakan untuk memperbaiki kelemahan internal yang masih dominan. Peluang eksternal seperti perkembangan e-learning, simulasi digital, dukungan kerja sama internasional, dan pembelajaran dari misi sebelumnya dapat digunakan untuk memperkuat bahasa asing, fasilitas latihan, kualitas instruktur, kurikulum, serta kemampuan teknis personel.

Secara praktis, strategi W-O dapat dioperasionalkan melalui empat langkah. Pertama, PMPP TNI perlu mengembangkan digital learning system yang memungkinkan peserta mempelajari materi dasar sebelum mengikuti latihan lapangan. Kedua, PMPP TNI perlu membangun modul simulasi berbasis skenario yang mereplikasi patroli, checkpoint,

negosiasi, perlindungan warga sipil, eskalasi konflik, gangguan keamanan, dan koordinasi sipil-militer. Ketiga, PMPP TNI perlu memperkuat kerja sama internasional untuk peningkatan kualitas instruktur dan benchmarking kurikulum. Keempat, PMPP TNI perlu mengintegrasikan lesson learned misi PBB ke dalam kurikulum secara terstruktur. Solusi strategis tersebut harus didukung oleh Mabes TNI dan satuan pengirim. Mabes TNI berperan dalam dukungan kebijakan, anggaran, modernisasi sarana latihan, dan kesiapan materiil. Satuan pengirim berperan melaksanakan pembinaan awal, khususnya bahasa Inggris dasar, disiplin, pemahaman misi, kesiapan fisik, dan kemampuan teknis sesuai spesialisasi. Dengan pembagian peran tersebut, peningkatan profesionalisme tidak hanya menjadi tanggung jawab PMPP TNI, tetapi menjadi sistem pembinaan terpadu dari satuan asal, PMPP TNI, sampai satuan tugas di daerah misi.

Artikel ini juga menegaskan pentingnya pembelajaran organisasi. Lesson learned dari personel yang kembali dari misi harus dikelola sebagai pengetahuan institusional, bukan hanya pengalaman individual (Krishnasamy, 2025). PMPP TNI perlu memiliki mekanisme yang mampu mengumpulkan, memverifikasi, mengklasifikasi, dan menerjemahkan pengalaman lapangan menjadi skenario latihan, modul kelas, evaluasi instruktur, dan rekomendasi kebijakan. Dengan cara ini, profesionalisme prajurit dapat diperbarui secara berkelanjutan sesuai perubahan mandat PBB dan dinamika konflik kontemporer. Dari sudut pandang teoritis, temuan artikel ini memperkuat gagasan bahwa profesionalisme militer modern memiliki dimensi yang lebih luas dibanding kemampuan kombatan (Janowitz, 1960; Brooks, 2021). Prajurit peacekeeper harus menjadi penjaga keamanan, komunikator sosial, perantara kepercayaan, pelindung warga sipil, dan representasi negara. Oleh karena itu, strategi PMPP TNI harus mengintegrasikan pembinaan kompetensi, karakter, teknologi, dan jejaring internasional. Integrasi tersebut menjadi prasyarat agar Indonesia tidak hanya mampu mempertahankan kontribusi jumlah personel, tetapi juga meningkatkan kualitas peacekeeper di forum internasional.

Tabel 8. Rumusan Strategi W-O untuk PMPP TNI

Kelemahan Internal	Peluang Eksternal	Strategi W-O	Output yang Diharapkan
Bahasa asing personel terbatas	E-learning dan kerja sama internasional	Membangun program bahasa Inggris peacekeeping berbasis daring, kelas intensif, dan praktik komunikasi misi.	Prajurit mampu berkoordinasi, melapor, bernegosiasi, dan berinteraksi dalam bahasa kerja misi.
Sarana simulasi belum realistis	Teknologi simulasi digital dan scenario-based training	Mengembangkan simulasi patroli, checkpoint, PoC, negosiasi, gangguan keamanan, dan interaksi multinasional.	Latihan lebih mendekati kondisi daerah operasi dan mengurangi gap adaptasi awal misi.
Kemampuan teknis alutsista belum merata	Lesson learned dan pelatihan teknis bersama	Mengintegrasikan pengalaman pengoperasian dan pemeliharaan ranpur/rantis dari misi sebelumnya ke modul teknis.	Kesiapan alutsista dan keselamatan personel meningkat.
Kualitas instruktur perlu terus diperkuat	Joint training dan Mobile Training Team	Mengirim instruktur mengikuti pelatihan internasional dan mengundang MTT untuk pembaruan materi.	Instruktur memiliki standar, pengalaman, dan metode pelatihan yang lebih mutakhir.
Kurikulum perlu lebih adaptif	Lesson learned dan perubahan mandat PBB	Melaksanakan pembaruan kurikulum periodik berdasarkan dinamika misi dan evaluasi satgas.	Materi PDT lebih relevan dengan ancaman dan mandat operasi terbaru.

Tabel 9. Matriks Strategi SWOT PMPP TNI

Strategi	Logika Strategi	Rumusan Strategi	Prioritas Implementasi
S-O	Menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal.	Mengoptimalkan sistem PDT, adaptasi sosial-budaya, dan materi latihan yang relevan untuk memperluas kerja sama internasional, joint training, dan lesson learned.	Peningkatan kualitas instruktur, benchmarking kurikulum, serta penyusunan modul berbasis pengalaman misi.
W-O	Memanfaatkan peluang eksternal untuk mengatasi kelemahan internal.	Mengembangkan e-learning, simulasi digital, program bahasa asing berkelanjutan, dan pelatihan teknis alutsista berbasis lesson learned.	Menjadi strategi prioritas karena posisi SWOT berada pada Kuadran II.
S-T	Menggunakan kekuatan internal untuk menghadapi ancaman eksternal.	Memperkuat disiplin, pembinaan mental, pemahaman mandat, dan kemampuan adaptasi untuk menghadapi dinamika konflik dan tekanan psikologis.	Pembaruan skenario latihan dan latihan pengambilan keputusan dalam kondisi tekanan.
W-T	Meminimalkan kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal.	Mengurangi risiko bahasa, fasilitas, alutsista, anggaran, dan logistik melalui standardisasi minimum, prioritas dukungan, dan evaluasi periodik.	Mitigasi risiko operasional dan penyusunan standar kesiapan sebelum deployment.

Matriks SWOT memperlihatkan bahwa seluruh alternatif strategi memiliki nilai guna, tetapi tidak seluruhnya memiliki prioritas yang sama. Strategi S-O digunakan untuk mengembangkan keunggulan yang sudah ada, strategi S-T digunakan untuk mempertahankan profesionalisme di tengah ancaman, dan strategi W-T digunakan untuk mitigasi risiko. Namun, hasil koordinat SWOT menunjukkan bahwa strategi W-O perlu ditempatkan sebagai fokus utama karena kelemahan internal masih lebih dominan dibanding kekuatan, sementara peluang eksternal relatif besar. Secara kelembagaan, strategi W-O dapat dijabarkan dalam peta jalan tiga tahap. Tahap pertama adalah penguatan fondasi, yaitu standarisasi pembinaan bahasa asing, identifikasi kebutuhan teknis per jenis penugasan, dan penyusunan database lesson learned. Tahap kedua adalah modernisasi metode, yaitu penerapan e-learning, simulasi digital, dan scenario-based training. Tahap ketiga adalah konsolidasi kualitas, yaitu sertifikasi instruktur, joint training, pembaruan kurikulum periodik, dan evaluasi dampak pelatihan terhadap kinerja prajurit di misi.

Dalam jangka pendek, PMPP TNI dapat memprioritaskan modul digital yang tidak membutuhkan investasi infrastruktur terlalu besar, seperti materi dasar PBB, ROE, PoC, bahasa Inggris operasional, istilah teknis kendaraan, dan studi kasus misi. Dalam jangka menengah, PMPP TNI dapat membangun fasilitas simulasi yang lebih realistis dan sistem evaluasi berbasis skenario. Dalam jangka panjang, PMPP TNI dapat dikembangkan sebagai pusat unggulan pelatihan peacekeeping regional dengan dukungan kerja sama internasional dan penguatan standar instruktur. Penekanan pada strategi W-O juga sejalan dengan kebutuhan agar pembinaan profesionalisme tidak berhenti pada tahap pelatihan. Prajurit yang telah kembali dari misi harus menjadi sumber pengetahuan melalui debriefing, wawancara pascamisi, penulisan lesson learned, dan pengembangan studi kasus. Data tersebut dapat dipakai untuk memperbarui kurikulum, mengidentifikasi risiko baru, memperkaya skenario latihan, dan menyiapkan generasi peacekeeper berikutnya dengan pengalaman yang lebih realistis. Dengan demikian, artikel ini menempatkan strategi PMPP TNI sebagai proses siklikal. Siklus tersebut dimulai dari penetapan standar dan tujuan

profesionalisme, dilanjutkan dengan pembinaan di satuan asal, seleksi, pelatihan PMPP, deployment, pendampingan selama misi, evaluasi pascamisi, dan pembaruan kurikulum. Semakin kuat siklus tersebut, semakin besar peluang PMPP TNI menghasilkan prajurit yang tidak hanya siap secara administratif, tetapi juga profesional secara substantif.

KESIMPULAN

Strategi PMPP TNI dalam meningkatkan profesionalisme prajurit pada operasi pemeliharaan perdamaian dunia dilaksanakan melalui penguatan sistem pelatihan praturgas, pembinaan mental dan disiplin, penguatan materi teknis dan taktis, pemahaman standar PBB, penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan operasi, serta pemanfaatan kerja sama internasional dan lesson learned. Strategi tersebut menunjukkan bahwa profesionalisme peacekeeper merupakan hasil pembinaan kelembagaan yang terencana, bukan sekadar kemampuan individual prajurit. Kendala utama yang dihadapi PMPP TNI meliputi keterbatasan kemampuan bahasa asing, sarana simulasi yang belum sepenuhnya realistis, kemampuan teknis pengoperasian dan pemeliharaan alutsista yang belum merata, serta keterbatasan dukungan anggaran, logistik, dan kesiapan alutsista. Hasil IFAS dan EFAS menempatkan PMPP TNI pada Kuadran II dengan koordinat (-0,20; 1,05), sehingga strategi yang paling tepat adalah strategi W-O, yaitu memanfaatkan peluang eksternal untuk memperbaiki kelemahan internal. Solusi strategis yang direkomendasikan adalah pengembangan e-learning dan digital learning system, peningkatan kemampuan bahasa asing secara berkelanjutan, pembangunan simulasi digital berbasis skenario, penguatan kerja sama internasional dan joint training, pembaruan kurikulum berbasis lesson learned, peningkatan kualitas instruktur, serta modernisasi sarana latihan dan dukungan alutsista. Temuan baru artikel ini adalah bahwa peningkatan profesionalisme prajurit peacekeeping perlu dipahami sebagai integrasi antara strategi kelembagaan, investasi sumber daya manusia, pembelajaran organisasi, dan pemanfaatan teknologi pelatihan. Keterbatasan artikel ini terletak pada fokus yang masih berada pada strategi PMPP TNI dan informan yang berkaitan langsung dengan proses penyiapan atau pengalaman misi. Penelitian lanjutan disarankan memperluas kajian pada pengukuran kompetensi prajurit sebelum dan setelah PDT, evaluasi efektivitas e-learning peacekeeping, serta perbandingan model pelatihan PMPP TNI dengan pusat pelatihan peacekeeping negara lain. Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penelitian, khususnya pembimbing, informan, dan institusi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmoro, R. D., Mahroza, J., & Santoso, T. I. (2024). Penyiapan pasukan dalam misi perdamaian PBB. Widina Media Utama.
- Becker, G. S. (1975). Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education. Columbia University Press.
- Brooks, R. (2021). Beyond Huntington: U.S. military professionalism today. *Parameters*, 51(1), 65-78. <https://doi.org/10.55540/0031-1723.3036>
- Buitelaar, T. (2025). Leadership agency in UN peace operations. *International Peacekeeping*, 32(2), 228-256. <https://doi.org/10.1080/13533312.2024.2400104>
- David, F. R. (2011). Strategic management: Concepts and cases (13th ed.). Pearson Education.
- Handoyo, H., & Muslim, M. A. (2024). Strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pasukan perdamaian di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI (PMPP TNI). *Jurnal EMT KITA*, 8(3), 1090-1105. <https://doi.org/10.35870/emt.v8i3.2827>
- Huntington, S. P. (1957). The soldier and the state: The theory and politics of civil-military relations. Harvard University Press.



- Janowitz, M. (1960). *The professional soldier: A social and political portrait*. Free Press.
- Krishnasamy, K. (2025). Experiential learning and peacekeeping. *International Peacekeeping*, 32(1), 35-72. <https://doi.org/10.1080/13533312.2024.2420646>
- Lykke, A. F., Jr. (1989). Defining military strategy. *Military Review*, 69(5), 2-8.
- Mardhani, D. (2020). Security and defence dalam studi ketahanan nasional guna mewujudkan sistem keamanan nasional. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 10(3), 279-294. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v10i3.862>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Ramly, A. T. (2016). Pengembangan sumber daya manusia yang unggul berbasis Pumping-HR Model. *Jurnal Manajemen*, 7(2), 138-149. <https://doi.org/10.32832/jm-uika.v7i2.1110>
- Suharyo, B. (2024). Cooperation management system model kerjasama sipil-militer dalam pengelolaan sumber daya nasional. Mega Press Nusantara.
- Sumertha, I. G., & Armawi, A. (2011). Kinerja PMPP TNI dalam penyiapan kemampuan prajurit TNI guna misi pemeliharaan perdamaian dunia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 17(1), 1-57.
- Suparman, S. W. (2023). Tugas dan fungsi Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI guna meningkatkan kesiapan operasi satuan tugas TNI dalam rangka memantapkan diplomasi militer di forum internasional. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(10), 4607-4617.
- United Nations Security Council. (2006). Resolution 1701 (2006) (S/RES/1701). United Nations.